

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung

Betaria Ayuh Suryaningsih

Politeknik STIA LAN Bandung
 e-mail : betaria.ayuh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta merumuskan strategi implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta penelusuran data sekunder seperti penelusuran website, dokumen laporan Satlinmas Kelurahan Padasuka, SK Pengangkatan Satlinmas Kelurahan Padasuka, laporan realisasi anggaran kegiatan Satlinmas Kelurahan Padasuka, dan studi literatur. Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung belum efektif. Terdapat kesenjangan antara realita dengan kebijakan terkait tiga aspek aktivitas implementasi kebijakan yaitu: pegorganisasian, interpretasi, dan penerapan/ pengaplikasian. Berkaitan dengan kesenjangan pada ketiga aspek tersebut peneliti mengajukan rekomendasi strategi yang diperoleh dari hasil analisis matrik *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat* (SWOT).

Kata Kunci: strategi; implementasi kebijakan; perlindungan masyarakat; kota bandung

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Challenges in the Implementation of Community Protection in Padasuka Village, Bandung City

Abstract

This study aims to identify strengths, weaknesses, opportunities and challenges as well as formulate strategies for implementing policies for the implementation of community protection in Padasuka Village, Bandung City. This research was conducted using a qualitative approach with data collection through interviews, observations, and secondary data tracing such as website searches, reports documents from Padasuka Village Satlinmas, SK for Appointment of Padasuka Village Satlinmas, reports on budget realization of Padasuka Village Satlinmas activities, and literature studies. Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung belum efektif. There is a gap between reality and policy regarding three aspects of policy implementation activities, namely: organization, interpretation, and application. In relation to the gap in the three aspects, the researcher proposes strategic recommendations obtained from the results of the analysis of the Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) matrix.

Keywords: strategy; policy implementation; community protection; Bandung

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal yang menarik pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan sosial menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satunya adalah perlindungan masyarakat.

Hal ini berarti bahwa perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu upaya memprioritaskan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah adalah dengan membuat kebijakan terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bandung diatur oleh kebijakan Peraturan Walikota Bandung No 1556 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Adapun yang menjadi pelaksana kebijakan secara langsung adalah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yaitu organisasi yang dibentuk oleh kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang tercantum pada Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Daerah Kota agar dapat berjalan secara efektif;
2. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Linmas.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satlinmas di Kota Bandung masih belum dapat mencapai tujuan kebijakan sebagaimana tercantum dalam Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018.

Lokus penelitian ini adalah di Kelurahan Padasuka Kota Bandung. Adapun yang menjadi alasan pemilihan Kelurahan Padasuka sebagai lokus penelitian karena Kelurahan Padasuka terpilih menjadi salah satu perwakilan dari 3 (tiga) kelurahan yang mewakili kelurahan se-Indonesia untuk mengikuti kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Asistensi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta penelusuran data sekunder seperti penelusuran website, dokumen laporan satlinmas, SK Pengangkatan Satlinmas, laporan realisasi anggaran kegiatan satlinmas, dan studi literatur.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realita dengan kebijakan. Adapun permasalahan yang muncul sebagai bukti adanya ketidaksesuaian tersebut peneliti klasifikasikan kedalam 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek pengorganisasian

Terdapat kesenjangan antara pengorganisasian sebagaimana diatur dalam kebijakan dengan yang terjadi dilapangan, yaitu diantaranya terkait dengan mekanisme perekrutan tidak sesuai dengan persyaratan, masa keanggotaan, belum terdapat pembagian regu tugas, dan penataan sumberdaya organisasi lainnya.

2. Aspek interpretasi

Pelaksana kebijakan belum mengetahui isi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3. Aspek pengaplikasian/ penerapan

Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing anggota Satlinmas dalam keseharian belum sesuai

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

dengan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat salah satunya karena belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas.

Berkaitan dengan permasalahan ketiga aspek yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mencoba untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung. Dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung.

Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung

Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Data yang diperoleh kemudian dibedakan menjadi data internal dan eksternal. Data internal merupakan data yang diperoleh dari dalam lingkungan organisasi sementara data eksternal diperoleh dari luar organisasi seperti laporan keuangan, dokumentasi kegiatan, dll. Model yang dipakai pada tahap ini terdiri dari matrik faktor strategi eksternal dan matrik faktor strategi internal. Berikut peneliti sajikan faktor strategi internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta faktor strategi eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman.

Internal Kekuatan (Strength)	Eksternal Peluang (Opportunity)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesepakatan internal mengenai wewenang yang berlaku. 2. Terjalannya komunikasi yang baik antara Kepala Satuan Tugas Satlinmas Kelurahan Padasuka dengan Satpol PP yang membidangi linmas 3. Kebebasan untuk mengelola dan mengendalikan anggaran yang dialokasikan oleh kecamatan untuk melaksanakan kegiatan linmas seperti pembinaan, pendidikan, dan pelatihan satlinmas. 4. Jumlah anggota satlinmas sesuai dengan jumlah RW yang terdapat di Kelurahan Padasuka, yaitu 16 RW. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alokasi anggaran dari kecamatan kepada kelurahan untuk honorarium Satlinmas. 2. Adanya kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan Kelurahan Padasuka untuk meningkatkan status keaktifan Satlinmas Kelurahan Padasuka. 3. Kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh inspektorat. 4. Adanya dukungan masyarakat terhadap aktivitas satlinmas dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka.
Kelemahan (Weakness)	Ancaman (Threat)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pelaksana kebijakan belum mengetahui dan memahami isi Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018 2. Anggota Satlinmas belum menguasai perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, khususnya dalam mekanisme pelaporan online. 3. Belum terdapat pembagian regu kerja. 4. Pola rekrutmen anggota yang masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018 masih berpedoman pada permendagri No 84 Tahun 2014 yang statusnya sudah dicabut. 2. Kurangnya pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 3. Belum adanya koordinasi antara Satlinmas Kelurahan Padasuka dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, dinas kebakaran, atau badan/ organisasi penanganan bencana lainnya dalam bentuk pembinaan, pendidikan, pelatihan. 4. Belum terdapat peraturan yang bersifat teknis/ operasional yang mengatur pelaksanaan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Formulasi strategi implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung

Formulasi strategi pada penelitian ini disusun berdasarkan analisis yang diperoleh dari penerapan model *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat* (SWOT). Peneliti menggunakan analisis SWOT karena analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*treats*) .

Adapun analisis SWOT dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menentukan faktor-faktor strategis eksternal

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Gambar Tabel Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)

Faktor-Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot X Rating
PELUANG:			
1. Adanya alokasi anggaran dari kecamatan kepada kelurahan untuk honorarium Satlinmas.	0,15	4	0,60
2. Adanya kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan Kelurahan Padasuka untuk meningkatkan status keaktifan Satlinmas Kelurahan Padasuka.	0,10	4	0,40
3. Kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh inspektorat.	0,20	3	0,60
4. Adanya dukungan masyarakat terhadap aktivitas satlinmas dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka.	0,10	3	0,30
ANCAMAN:			
1. Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018 masih berpedoman pada permendagri No 84 Tahun 2014 yang statusnya sudah dicabut.	0,15	1	0,15
2. Kurangnya pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat.	0,10	2	0,20
3. Belum adanya koordinasi antara Satlinmas Kelurahan Padasuka dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, dinas kebakaran, atau badan/ organisasi penanganan bencana lainnya dalam bentuk pembinaan, pendidikan, pelatihan.	0,10	2	0,20
4. Belum terdapat peraturan yang bersifat teknis/ operasional yang mengatur pelaksanaan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat.	0,15	1	0,15
TOTAL	1,0		2,60

dengan rating dimulai dari skala 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*). Pemberian rating adalah berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap aktivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang dan kekuatan bersifat positif (peluang/ kekuatan yang semakin besar diberi nilai +4), tetapi jika peluang/ kekuatan kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman dan kelemahan adalah kebalikannya. Apabila nilai ancaman/ kelemahan sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya jika nilai ancaman/ kelemahan sedikit ratingnya adalah 4. Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh pembobotan dalam kolom 4, hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor.

2. Merumuskan alternatif strategi melalui matrik internal-eksternal dan matrik SWOT

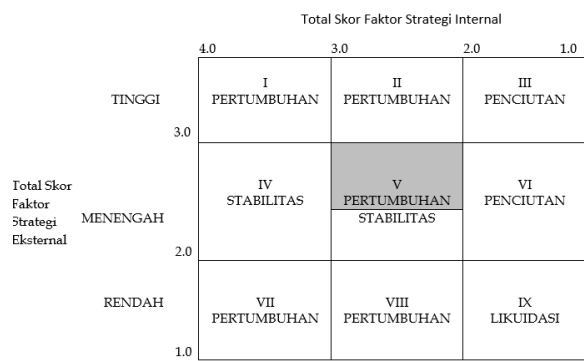
Menentukan faktor-faktor strategis internal

Gambar Tabel Internal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)

Faktor-Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot X Rating
KEKUATAN:			
1. Adanya kesempatan internal mengenai wewenang yang berlaku.	0,15	4	0,60
2. Terjalannya komunikasi yang baik antara Kepala Satuan Tugas Satlinmas Kelurahan Padasuka dengan Satpol PP yang mibidangi linmas	0,10	3	0,30
3. Kebebasan untuk mengelola dan mengendalikan anggaran yang dialokasikan oleh kecamatan untuk melaksanakan kegiatan linmas seperti pembinaan, pendidikan, dan pelatihan satlinmas.	0,15	2	0,30
4. Jumlah anggota satlinmas sesuai dengan jumlah RW yang terdapat di Kelurahan Padasuka, yaitu 16 RW.	0,10	2	0,20
KELEMAHAN:			
1. Para pelaksana kebijakan belum mengetahui dan memahami isi Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018	0,20	1	0,20
2. Anggota Satlinmas belum menguasai perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat khususnya dalam mekanisme pelaporan online.	0,10	2	0,20
3. Belum terdapat pembagian regu kerja.	0,10	1	0,10
4. Pola rekrutmen anggota yang masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku.	0,10	2	0,20
TOTAL	1,0		2,10

Selanjutnya setelah membuat matrik EFAS dan IFAS adalah membuat matrik internal eksternal (IE Matrik) untuk melihat strategi yang tepat untuk diterapkan.

Gambar Internal Eksternal (IE) Matrik Strategi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung



Tahapan kegiatan 1 dan 2 dilakukan dengan cara peneliti menyusun faktor strategi eksternal/internal dalam kolom 1, kemudian memberikan bobot pada kolom 2 untuk masing-masing faktor. Besarnya bobot dimulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Pemberian bobot berdasarkan kemungkinan masing-masing faktor tersebut memberikan dampak terhadap faktor strategis. Kolom 3 diisi

Berdasarkan matrik IE dapat dilihat bahwa strategi yang tepat untuk implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat berada pada sel V (Pertumbuhan) yaitu strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Rangkuti (1997) mengemukakan bahwa strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal yaitu suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun di lokasi yang lain, dan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

meningkatkan jenis produk serta jasa. Berdasarkan pengertian tersebut berarti organisasi Satlinmas Kelurahan Padasuka harus dapat memperluas jangkauan kerjanya dengan cara membuat posko-posko linmas sebagaimana yang disebutkan dalam Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018 bahwa salah satu upaya pemberdayaan satlinmas adalah dengan membuat dan menyiapkan posko satlinmas. Selain itu Satlinmas Kelurahan Padasuka juga harus meningkatkan jenis produk dan jasanya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Kemudian setelah membuat IE matrik, langkah selanjutnya membuat matrik SWOT, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar Matrik SWOT Strategi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya alokasi anggaran dari kecamatan kepada kelurahan untuk honorarium Satlinmas. Adanya kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan Kelurahan Padasuka untuk meningkatkan status keaktifan Satlinmas Kelurahan Padasuka. Kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap aktivitas satlinmas dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka. 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan anggaran kegiatan penyelenggaraan linmas untuk mengadakan kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat RIV. Menjadikan anggota satlinmas dari masing-masing RIV untuk menjadi <i>Agent of Change</i> penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat RT. 	<p>STRATEGI WO</p> <p>Memperkuat peran Lurah sebagai Kepala Satuan Linmas dalam melakukan rekrutmen anggota Satlinmas di Kelurahan Padasuka</p>
<p>THREATS (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018 masih berpedoman pada permendagri No 84 Tahun 2014 yang statusnya sudah dicabut. Kurangya pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Belum adanya koordinasi antara Satlinmas Kelurahan Padasuka dengan EPD (jawa Barat atau badan/ organisasi penanganen bencana lainnya dalam bentuk pembinaan, pendidikan, pelatihan). Belum terdapat peraturan teknis/ operasional tentang bentuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 	<p>STRATEGI ST</p> <p>Berkoordinasi dengan Satpol PP untuk meninjau kembali Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018 agar sesuai dengan peraturan di atasnya yaitu Permendagri No 26 Tahun 2020</p>	<p>STRATEGI WT</p> <ol style="list-style-type: none"> Membentuk regu kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satlinmas Berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bandung untuk dapat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau peraturan teknis lainnya terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bandung

Berdasarkan matrik SWOT yang telah dibuat, dapat terlihat bagaimana kelemahan internal dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh Satlinmas Kelurahan Padasuka dapat disesuaikan dengan kekuatan dan peluang yang ada, dengan membuat matrik SWOT akan menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi, yaitu:

1. Strategi SO : strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi WO: strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
3. Strategi ST: strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
4. Strategi WT: strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian pada permasalahan yang ada dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan Padasuka Kota Bandung masih belum berjalan efektif. Oleh karenanya peneliti mengajukan rekomendasi strategi yang diperoleh dari hasil analisis matrik SWOT yang telah dibuat yaitu sebagai berikut:

Kelurahan Padasuka dapat menggunakan anggaran kegiatan penyelenggaraan linmas untuk mengadakan kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat RW. (Strategi SO)

Menjadikan anggota satlinmas dari masing-masing RW untuk menjadi *Agent of Change* penyelenggaraan linmas di tingkat RT. (Strategi SO)

Memperkuat peran lurah sebagai Kepala Satuan Linmas dalam melakukan rekrutmen anggota Satlinmas di Kelurahan Padasuka. (Strategi WO) Berkoordinasi dengan Satpol PP untuk meninjau kembali Perwal Kota Bandung No 1556 Tahun 2018 agar sesuai dengan peraturan di atasnya yaitu Permendagri No 26 Tahun 2020. (Strategi ST)

Membentuk regu kerja pada Satlinmas Kelurahan Padasuka untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satlinmas dalam keseharian. (Strategi WT) Berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bandung untuk dapat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau peraturan teknis lainnya terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bandung. (Strategi WT)

REFERENSI

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Bandung No 1556 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Istamto, R. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. (Terjemahan dari *An Introduction to the Study of Public Policy* by Charles O Jones). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jones, C.O. 1970. *An Introduction to the Study of Public Policy*. California: Wadsworth Publishing Company, Inc.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era *Post Truth*
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

(<https://z-lib.org/>) (Diunduh pada tanggal 08
Desember 2021)

Abad 21. Jakarta: Gramadeia Pustaka
Utama.

Rangkuti, F. 1997. *Analisis SWOT: Teknik
Membedah Kasus Bisnis-Reorientasi Konsep
Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi*

Heene, dkk. 2010. *Manajemen Strategik
Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika
Aditama.